



Antara Domestik Dan Publik : Peran Gender Polisi Wanita di Kepolisian Resor Sumba Timur

Dila Rebeka Djoh¹, Rambu Luba Kata Respati Nugrohowardhani^{2*}

^{1,2} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, Indonesia

Alamat: Jl. R. Suprapto No.35, Prailiu, Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur

Korepsondensi penulis: beckydjoh7@gmail.com

Abstract. This study explores how policewomen (Polwan) at the East Sumba Police Resort (Polres Sumba Timur) manage dual roles—as law enforcers in the public sphere and as wives and mothers within the domestic sphere. A qualitative method was employed, using data collection techniques such as field observation, in-depth interviews, and document analysis. The findings reveal that Polwan are capable of balancing their professional and familial responsibilities, despite facing challenges such as demanding work schedules, psychological stress, and limited institutional support. To overcome these obstacles, they adopt strategies such as effective time management, maintaining open communication with family members, and seeking moral support from colleagues. Overall, the study shows that policewomen possess strong adaptive capabilities in fulfilling their dual roles and contribute positively to the advancement of women's roles in public institutions. These findings are expected to inform the development of more inclusive and gender-responsive policies within the police force.

Keywords: domestic sphere, dual roles, East Sumba Police Resort, policewomen, public sphere

Abstrak. Penelitian ini mengkaji bagaimana Polisi Wanita (Polwan) di lingkungan Polres Sumba Timur menjalankan dua peran sekaligus, yakni sebagai penegak hukum di ruang publik serta sebagai ibu dan istri dalam lingkup domestik. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi tertulis. Temuan menunjukkan bahwa para Polwan mampu menyeimbangkan tanggung jawab profesional dan keluarga, meskipun menghadapi sejumlah hambatan seperti padatnya jadwal kerja, tekanan psikologis, serta minimnya fasilitas pendukung dari institusi. Untuk mengatasi hal tersebut, para Polwan menerapkan strategi seperti pengelolaan waktu yang efisien, membangun komunikasi yang sehat dengan anggota keluarga, serta menerima dukungan moral dari rekan sejawat. Keseluruhan hasil penelitian mengindikasikan bahwa Polwan memiliki kemampuan adaptasi yang kuat dalam menjalani peran ganda, serta menunjukkan kontribusi positif terhadap penguatan peran perempuan dalam sektor publik. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga kepolisian dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anggota perempuan.

Kata kunci: ranah domestik, peran ganda, Kepolisian Resor Sumba Timur, polwan, ranah publik

1. LATAR BELAKANG

Menjadi Polisi Wanita (Polwan) adalah pekerjaan yang menantang. Sebagai polisi, tugas utama mereka adalah menghadapi kekerasan yang bersifat maskulin. Sebagai perempuan, mereka diharapkan untuk menunjukkan sifat feminim dalam sikap dan tingkah laku baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja. Pada tahun 2023, jumlah Polisi Wanita di Indonesia sekitar 26.000 orang, atau 6 persen dari total anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencapai sekitar 434.000 orang sebagai bagian pengembangan fungsi profesi Polri memiliki fungsi dan peran sangat strategis dalam mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Polwan memiliki fungsi ganda tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, melainkan juga memiliki fungsi sosial sebagai aktor utama edukasi kesadaran hukum kepada

masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Tugas polwan berkembang jauh hampir menyamai berbagai tugas polisi pria, yakni kenakalan anak-anak dan remaja, kasus perkelahian antarpelajar yang terus meningkat dan kasus kejahanan wanita yang memprihatinkan.

Di Kabupaten Sumba Timur terdapat juga polisi Wanita. Berdasarkan hasil wawancara awal, penulis mendapatkan informasi jumlah Polisi Wanita di Kepolisian Resor Sumba Timur berjumlah 8 orang dari total jumlah polisi sebanyak 372 orang. Dengan demikian rasio polisi di Kepolisian Resor Sumba Timur berdasarkan jenis kelamin adalah 1:46,5. Kondisi ini menggambarkan keterwakilan perempuan yang masih sangat minim dalam institusi kepolisian. Hal ini berkaitan dengan tantangan yang dihadapi Polwan dalam menjalankan peran ganda mereka, yaitu peran domestik sebagai anggota keluarga dan peran publik sebagai aparat penegak hukum. Ketidakseimbangan ini berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan kepolisian, khususnya yang berhubungan dengan perempuan dan anak. Oleh sebab itu, penting untuk meningkatkan jumlah serta pemberdayaan Polwan agar mereka dapat menyeimbangkan peran domestik dan publik secara optimal, sehingga institusi kepolisian dapat menjadi lebih inklusif dan peka terhadap isu gender. Terkait dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk memahami bagaimana para Polisi Wanita di Kepolisian Resor Sumba Timur menjalankan peran gender mereka dalam pekerjaan dan rumah tangga karena menjadi Polisi Wanita tidak hanya menghadapi latihan berat dan sangat menguras tenaga, tapi mereka juga kerap kali harus menghadapi realita hidup yang juga membutuhkan tenaga dan mental.

Peran gender adalah perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat/komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas atau tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Peran gender dapat berubah, dan dipengaruhi oleh umur, kelas, ras, etnik, agama dan lingkungan geografi, ekonomi dan politik. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki peran ganda di dalam masyarakat. Perempuan kerap mempunyai peran dalam mengatur reproduksi, produksi dan kemasyarakatan. Laki-laki lebih terfokus pada produksi dan politik kemasyarakatan.

Penelitian tentang polisi wanita (Polwan) sudah cukup banyak dilakukan seperti misalnya penelitian yang dilakukan oleh; Yurendra & Rasyidah (2019), Sartin dkk (2019), Sulastri & Almurhan (2019), Yusri & Farida (2018), dan Saviera & Juniarly (2020) yang fokusnya pada peran ganda polwan, baik dengan menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Sebagai contoh, Polisi Wanita di Polda Aceh mengakui kesulitan dalam menyeimbangkan peran ganda mereka, khususnya dalam menanggung beban ganda sebagai polisi wanita dan sebagai ibu rumah tangga dalam keluarganya (Yurendra & Rasyidah, 2019).

Sementara itu, Polisi Wanita di Pulau Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi juga memiliki peran ganda yang diidentifikasi penulisnya sebagai peran di ruang domestik dan peran di ruang publik (Sartin dkk., 2019). Selanjutnya penelitian oleh Yusri & Farida (2018) dengan pendekatan kuantitatif menunjukkan bahwa Polisi Wanita di Kepolisian Resor Kota Padang memiliki tingkat stres kerja sebesar 2% berdasarkan skala stress kerja yang digunakan untuk menguji tingkat stress kerja dari 48 orang polisi Wanita di Kepolisian Resor Padang. Hasil studi itu menunjukkan bahwa rendahnya tingkat stres karena tingkat pekerjaan yang juga rendah (Yusri & Farida, 2018). Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, Saviera & Juniarly (2020) menunjukkan bahwa konflik peran ganda yang dihadapi Polisi Wanita di Kota Palembang terkait signifikan dengan keterlibatan mereka sebagai polisi. Berdasarkan beberapa kajian tentang peran ganda Polwan tersebut di atas, penulis belum menemukan kajian yang membahas tentang tumpang tindih antara peran polisi wanita pada ruang domestik dan peran mereka pada ruang publik. Padahal, seringkali peran polisi di ruang domestik tidak jauh berbeda dari peran mereka di ruang publik, seperti yang tersirat dalam kajian-kajian tentang polisi wanita tersebut di atas.

Rumusan masalah utama dalam studi ini adalah identifikasi peran gender Polisi Wanita (Polwan) di Kepolisian Resor Sumba Timur. Adapun pertanyaan penelitian dalam kajian ini adalah: Bagaimanakah peran gender Polisi Wanita (Polwan) di Kepolisian Resor Sumba Timur? Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan utama penelitian ini adalah memahami peran gender Polisi Wanita di Kepolisian Resor Sumba Timur dalam dua ranah utama yang berbeda, yaitu ranah domestik sebagai ibu rumah tangga dan ranah publik sebagai aparat kepolisian.

2. KAJIAN TEORETIS

Untuk memahami peran gender polisi wanita, penelitian ini menggunakan teori peran gender sebagai kerangka analisis. Adapun peran gender sendiri merujuk pada harapan sosial dan kultural yang terkait dengan perilaku, tanggung jawab, dan aktivitas yang dianggap sesuai untuk laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat. Konstruksi sosial dan kultural pada peran gender akan mempengaruhi pemberian tanggungjawab dalam masyarakat dan membentuk cara seseorang berinteraksi dan berperilaku (Hura dan Nugrohowardhani, 2024). Dalam bidang ilmu ekonomi, peran gender dalam masyarakat erat kaitannya dengan perkembangan teori pembagian kerja (*division of labor*) yang merujuk pada pengaturan tugas dalam masyarakat untuk meningkatkan efisiensi. Namun, ketika dikaitkan dengan gender,

konsep ini berkembang menjadi pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin (*sexual division of labour*), di mana tugas dibagi berdasarkan jenis kelamin.

Pada perkembangannya, pembagian kerja ini mempengaruhi peran gender dengan mengalokasikan tugas berdasarkan norma dan harapan masyarakat mengenai gender, yang pada gilirannya memengaruhi cara perempuan dan laki-laki memandang tanggung jawab dan kemampuan mereka. Secara turun temurun peran gender dibedakan berdasarkan ruang lingkup kegiatan yaitu ranah domestik yang identik dengan ruang di dalam rumah dan ranah publik yang identik dengan ruang di luar rumah. Pada masing-masing ranah ada pembagian peran yang jelas, yaitu peran domestik dan peran publik. Peran domestik merujuk pada tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan pengelolaan kegiatan di dalam rumah tangga dan keluarga, seperti misalnya memasak, membersihkan rumah, menjaga anak, dan merawat anggota keluarga lainnya. Peran domestik acapkali diasosiasikan dengan perempuan dan tidak mendapatkan upah. Peran inilah yang mencerminkan pembagian kerja yang masih berlaku di banyak masyarakat. Sementara itu peran publik adalah tugas dan tanggung jawab yang dilakukan di luar lingkungan rumah tangga, dibayar, dan terkait dengan sektor ekonomi, politik, dan sosial. Sebagai contoh adalah pekerjaan di sektor industri, jasa, pendidikan, dan lainnya.

Pembedaan antara peran domestik dan publik ini terkait dengan struktur sosial dan ekonomi yang memisahkan peran-peran ini dan memberikan akses yang berbeda kepada perempuan dan laki-laki. Secara historis, dikotomi peran ini diperkuat juga oleh interpretasi keagamaan dan hukum yang menempatkan perempuan sebagai manusia kelas dua, kurang kompeten, dan emosional, sehingga peran perempuan di ranah publik sangat dibatasi dan seringkali hanya sebagai objek. Sampai sekarang, peran perempuan di ranah domestik dan publik masih menjadi perdebatan antara berbagai kelompok aktivis; sebagian memperjuangkan kesetaraan peran di kedua ranah, dan sebagian lainnya masih mempertahankan pembagian peran gender secara tradisional. Namun walau masih menjadi perdebatan, fenomena empirik menunjukkan terjadinya pergeseran makna yang terkait dengan peran gender di berbagai belahan dunia.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa teori peran gender yang membedakan peran domestik dan publik muncul dari konstruksi sosial budaya patriarki yang mengaitkan perempuan dengan ranah domestik dan laki-laki dengan ranah publik. Seiring waktu, teori ini berkembang dengan pengakuan bahwa peran gender adalah hasil norma sosial yang dapat berubah. Dengan demikian, perempuan memiliki kapasitas serta hak untuk berperan di ranah publik, sementara laki-laki juga didorong untuk berbagi peran domestik demi keadilan gender.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Kepolisian Resor Sumba Timur yang terletak di Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Jumlah narasumber dalam penelitian ini adalah 6 orang, yang terdiri dari 4 orang Polisi Wanita dan 2 orang Polisi Laki-laki. Hasil pengumpulan data dituangkan dalam bentuk transkrip wawancara dan laporan observasi serta dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis tematik yang diambil dari teori peran gender sebagai kerangka analisisnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum tentang Polisi Wanita di Kepolisian Resor Sumba Timur

Kepolisian Resor Sumba Timur merupakan sebuah kantor yang berdiri sejak Tahun 1945 di Waingapu, ibukota Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Polisi di Kepolisian Resor Sumba Timur dibedakan menjadi Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan Pegawai Negeri Sipil Polisi Republik Indonesia (PNS POLRI). Tugas utama POLRI terkait dengan pemberantasan kejahatan dan pelanggaran demi menjaga keamanan dan ketertiban NKRI. Sementara itu, tugas utama dari PNS POLRI sama dengan tugas pokok POLRI, namun PNS POLRI tidak punya wewenang penindakan hukum seperti POLRI. Walaupun ada perbedaan tugas dan tanggungjawab, namun dalam bahasa sehari-hari istilah umum untuk kedua kategori itu sama-sama disebut sebagai “Polisi”. Sementara itu, jumlah total Polisi Wanita di Kepolisian Resor Sumba Timur adalah 12 orang. Delapan (8) orang diantaranya adalah POLRI dan sisanya sebanyak 4 orang adalah PNS POLRI. Dalam penelitian ini, hanya Polwan yang masuk dalam kategori POLRI saja yang menjadi narasumber utama.

Secara umum Polwan memiliki tugas yang sama dengan Polisi laki-laki, seperti yang tercantum dalam UU Kepolisian No.2 Tahun 2002 pasal 13, yaitu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun terdapat beberapa kebijakan yang diberikan kepolisian terhadap khususnya Polwan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala bagian hubungan masyarakat Polres Sumba Timur, organisasi kepolisian disini dibagi menjadi empat bagian, yaitu bagian satuan lalu lintas, bagian reserse kriminal, bagian intel, dan bagian operasi. Dengan berbagai tugas Polwan dan jam kerja yang sangat padat, mereka memiliki beban yang cukup berat karena mereka dihadapkan pada dua hal penting yaitu keberhasilan sebagai polisi dan kesuksesan membina rumah tangga. Polwan yang berkeluarga

dikatakan memiliki peran ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai anggota kepolisian. Berdasarkan wawancara dengan empat orang polisi, (80%) diantaranya mengatakan bahwa mereka sering kelelahan dalam menjalankan kedua peran tersebut. Mereka harus bekerja karena menjadi seorang Polwan merupakan cita-cita mereka sejak remaja dan mereka tidak mau meninggalkan pekerjaan mereka begitu saja karena untuk menjadi seorang Polwan tidaklah mudah.

Motivasi dan Karir sebagai Polwan di Kepolisian Resor Sumba Timur

Peran gender yaitu perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat atau komunitas yang kondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas atau tanggung jawab patut di terima baik oleh laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini peran yang dimaksud adalah peran seorang perempuan sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, dan peran sebagai perempuan yang memiliki karir di luar rumah. Peran inilah yang dialami oleh polisi wanita di Polres Sumba Timur, peran gender disebutkan dengan konsep dualisme kultural, yakni adanya konsep lingkungan domestik maupun lingkupan publik. Tugas polwan yang berat adalah dimana mereka terpaksa dihadapkan kepada dua hal yang sama penting dan beratnya, keberhasilan menjadi polisi dan kesuksesan dalam rumah tangga. Pasalnya, kodrat polwan sebagai seorang wanita adalah menjadi pendorong bagi suami serta ibu bagi anak-anaknya. Dengan demikian kinerja nya sebagai polwan pun terkadang bisa menurun dikarenakan tidak dapatnya menyeimbangkan peran tersebut.

Berdasarkan penelitian lapangan ditemukan bahwa motivasi narasumber dapat dibedakan secara umum menjadi dua. Pertama, motivasi karena dibesarkan dalam keluarga polisi. Hal ini menyebabkan mereka sudah bercita-cita menjadi polisi sejak kecil, sama seperti seperti ayah dan kakak mereka. Kedua, selain karena dibesarkan dalam keluarga polisi, narasumber juga menyebutkan bahwa motivasi menjadi polisi wanita muncul ketika mereka sudah dewasa dan menganggap bahwa profesi sebagai polisi wanita “keren” dan tegas. Hal tersebut mendorong mereka untuk mengikuti tes menjadi Polisi. Terkait dengan karir, salah seorang narasumber yang bergelar sarjana menyebutkan bahwa saat ini ia menduduki jabatan yang cukup startegis dalam jajaran jabatan struktual di Kepolisian. Hal ini seperti yang diungkap salah satu narasumber berikut:

“Saya sudah lama menjadi polwan dan sekarang saya bersyukur karena di percayakan menduduki jabatan sebagai BANIT PPA SATRESKRIM, tugas spesifik yang saya tangani perkara yang terkait perempuan dan anak termasuk kekerasan dalam rumah tangga,

persetubuhan anak, pencabulan anak, penganiayaan anak, kekerasan seksual terhadap perempuan”

Peran Gender Polwan di Kepolisian Resor Sumba Timur

Peran gender yaitu perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat atau komunitas yang kondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas atau tanggung jawab patut di terima baik oleh laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini peran yang dimaksud adalah peran seorang perempuan sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, dan peran sebagai perempuan yang memiliki karir di luar rumah. Peran inilah yang dialami oleh polisi wanita di Polres Sumba Timur, peran gender disebutkan dengan konsep dualisme kultural, yakni adanya konsep lingkungan domestik maupun lingkupan publik. Tugas polwan yang berat adalah dimana mereka terpaksa dihadapkan kepada dua hal yang sama penting dan beratnya, keberhasilan menjadi polisi dan kesuksesan dalam rumah tangga. Pasalnya, kodrat polwan sebagai seorang wanita adalah menjadi pendorong bagi suami serta ibu bagi anak-anaknya. Dengan demikian kinerja nya sebagai polwan pun terkadang bisa menurun dikarenakan tidak dapatnya menyeimbangkan peran tersebut.

Peran Domestik Polwan di Kepolisian Resor Sumba Timur

Polwan di Sumba Timur tetap memiliki tanggung jawab penuh dalam urusan rumah tangga, mulai dari mengurus anak, menyiapkan kebutuhan suami, hingga tugas-tugas domestik lainnya. Meskipun bekerja penuh waktu, ekspektasi sosial dan budaya di lingkungan mereka masih menempatkan perempuan sebagai "pengurus utama rumah tangga". Hal itu disampaikan narasumber sebagai berikut:

“Seperti halnya kami polwan ya yang juga adalah seorang ibu dan istri, kami dituntut harus bisa dalam semua peran itu, mau sebagai istri harus siaga dalam mengurus suami dan sebagai ibu yang harus memastikan kebutuhan anak dan maupun sebagai polwan yang harus siap sedia untuk masyarakat dalam waktu 24 jam”

Mereka mengaku kesulitan membagi waktu antara tanggung jawab rumah dan pekerjaan, terutama saat mendapat tugas mendadak atau ke luar kota seperti yang disampaikan narasumber berikut:

“Terkadang sangat susah menyeimbangkan peran yang menurut saya itu sama-sama penting ya, apalagi sekarang ini kan kerjaan lagi banyak sekali, anak dirumah saya kasih tinggal dengan pengasuh, karna saya dan suami kan sama-sama sibuk, kadang saya curi-curi waktu untuk pulang sebentar. kepikiran sih, saya takut anak saya kurang perhatian dari orang

tuanya tapi ya mau bagaimana lagi, sudah jadi tuntutan, kadang kinerja pun menurun kalau sudah mulai stres mikirnya, dan seringkali anak buah yang kena sasaran.”

Beban kerja yang harus ditanggung membuat urusan rumah tangganya terkadang terbangkalai, apalagi mereka tidak memiliki pembantu atau asisten rumah tangga. Hal ini disampaikan narasumber berikut:

“Susahnya ini saya tidak punya asisten rumah tangga atau pun pengasuh ya, jadi semuanya saya lakukan sendiri, dari membersihkan rumah, menyiapkan makanan, sampai mengantar kesekolah pun saya mengerjakannya sendiri dan terkadang dibantu oleh suami, makanya kadang sering kerjaan kantor pun sering kelewatan deadline karena kan saya harus mengerjakan semua.”

Tuntutan pekerjaan yang terlalu banyak serta harus mengurus keluarga sering kali membuat narasumber kesulitan dalam membagi waktu dan juga berpengaruh terhadap kemaksimalan dalam pekerjaan. Polwan juga mengatakan dengan adanya pembagian kerja dalam rumah tangga sedikit meringankan beban yang memiliki dua peran, dimana sang suami mau berbagi tugas rumah tangga bersama dirinya, terkadang disaat mereka ada keperluan mendesak dan pekerjaan rumah atau anak belum siap suami bersedia membantu.

“Saya kadang suka telat atau ada urusan yang mendesak yang mengharuskan pergi ke kantor cepat, jadi otomatiskan pekerjaan rumah masih belum beres, sarapan juga kadang belum siap, tapi suami bersedia membantu menyiapkan untuk anak kalau suami ada libur, atau kadang bantu jemput anak kalau saya tidak bisa. Kadang juga disaat kami sama-sama sibuk itu yang agak susah, saya harus minta tolong sama adik atau saudra lainnya”.

Peran Publik Polwan di Kepolisian Resor Sumba Timur

Dalam peran publik, Polwan menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas seperti patroli, pengamanan acara, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, masih ditemukan pembatasan peran strategis, di mana penempatan Polwan cenderung pada bidang-bidang yang dianggap “lembut” seperti administrasi, humas, dan perlindungan anak. Meskipun memiliki kemampuan dan potensi, keikutsertaan Polwan dalam operasi lapangan berskala besar atau posisi kepemimpinan masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh stereotip institusional dan anggapan bahwa tugas berat lebih cocok dijalankan oleh polisi laki-laki, seperti yang disampaikan narasumber berikut:

“saya memiliki dua peran dimana yang mengharuskan saya pandai-pandai membagi waktu, suami saya juga seorang polisi. Walaupun dibilang kami berkecukupan tapi sudah

perjanjian dari awal mau menikah saya sudah bilang kepada suami kita memiliki peran yang sama dimana dia sebagai suami nantinya akan memiliki istri yang sibuk juga sama seperti dia. Jadi dari awal juga sudah saya katakan mungkin juga nantinya saya juga akan lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah untuk bertugas daripada dirumah untuk bersama atau mengurus anak.”

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Polisi Wanita (Polwan) dan Polisi Laki-laki (Polki) di Kepolisian Resor (Polres) pada posisi atau jabatan yang setara adalah sama. Namun, meskipun secara struktural dan kebijakan tugasnya setara, dalam implementasi sehari-hari terdapat perbedaan penekanan atau kecenderungan tugas yang paling menonjol, terutama karena faktor sensitivitas gender dan kepekaan sosial. Sebagai contoh, Polwan memiliki peran yang sangat krusial dan seringkali diutamakan dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau kejahatan lain yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban. Kehadiran Polwan dapat membuat korban merasa lebih nyaman dan aman untuk bercerita, memfasilitasi proses penyelidikan, dan memberikan pendampingan psikologis yang lebih empatik. Polwan sering dipercayakan untuk melakukan wawancara pada korban, pendampingan, dan upaya konseling. Berikut ini adalah kutipan wawancara yang menyinggung tentang hal tersebut:

“Secara umum, posisi dan pekerjaan sehari-hari Polisi Wanita memiliki kesamaan dengan Polisi Laki-Laki. Terdapat perbedaan spesifik terkait tugas-tugas Kepolisian yang memerlukan kehadiran Polisi Wanita . Selanjutnya, dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka Wanita, anak-anak, atau pengamanan lainnya, kehadiran Polisi Wanita Juga sangat di Perlukan

Selain itu, Polwan cenderung lebih banyak dilibatkan dalam kegiatan yang bersifat pelayanan, pengayoman, dan penyuluhan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sosial, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan. Mereka sering menjadi garda terdepan dalam program-program kemasyarakatan, sosialisasi bahaya narkoba, atau kampanye keselamatan lalu lintas di sekolah-sekolah. Kepekaan dan kemampuan komunikasi interpersonal Polwan sering dianggap lebih efektif dalam membangun kedekatan dengan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Hal lain yang juga sering terjadi adalah kecenderungan Polwan ditempatkan pada posisi administratif dan kesekretariatan dalam beberapa unit kerja. Ini bukan berarti Polisi Laki-Laki (Polki) tidak ada di posisi tersebut, tetapi secara historis dan budaya, peran ini sering dikaitkan dengan Polwan. Namun, seiring waktu, distribusi tugas ini semakin merata.

Dalam pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari, beberapa peran yang umumnya diemban oleh Polisi Wanita (Polwan) dapat dialihkan atau digantikan sementara oleh Polisi Laki-laki apabila Polwan tidak berada di tempat. Namun, terdapat pengecualian yang krusial dan tidak dapat ditawar: untuk tugas yang berkaitan langsung dengan penggeledahan terhadap tersangka wanita, kehadiran Polisi Wanita adalah suatu keharusan mutlak. Aturan ini ditegakkan demi menjaga kehormatan, privasi, dan hak asasi tersangka wanita, serta untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang atau tuduhan yang tidak diinginkan.

”Apabila Polisi Wanita tidak berada di tempat, beberapa tugas umum mungkin dapat digantikan oleh Polisi Laki-laki. Namun, untuk tugas yang berkaitan langsung dengan penggeledahan terhadap tersangka wanita, kehadiran Polisi Wanita adalah suatu keharusan. Jika tidak ada Polisi wanita, bantuan dapat diminta dari Pihak perempuan lain yang terpercaya, seperti Bhayangkari.”

Pembahasan

Berdasarkan temuan dapat disampaikan bahwa untuk Polwan yang telah berkeluarga maka ia memiliki dua peran yang berbeda berdasarkan ruang lingkup atau wilayah kerja. Peran pertama dilakukannya dalam ruang lingkup rumah tangga dimana tugas dan tanggung jawab utamanya adalah sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Peran kedua dilakukan Polwan pada ruang lingkup kantor kepolisian resor dimana ia memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai aparat kepolisian. Namun, Polwan di Kepolisian Resor Sumba Timur tidak memiliki pilihan lain dalam membagi tugas rumah tangganya, kecuali dengan suaminya. Kondisi ekonomi mereka yang terbatas dan nilai-nilai budaya yang masih kuat memposisikan perempuan, termasuk Polisi Wanita, sebagai tokoh sentral dalam pekerjaan rumah tangga, tanpa banyak kesempatan untuk mendeklasikan peran tersebut kepada pihak lain. Lebih dari itu, norma-norma budaya lokal turut menciptakan tekanan tersendiri. Banyak Polwan merasa enggan untuk menolak peran domestik karena khawatir dianggap tidak menjalankan kodratnya sebagai perempuan, istri, atau ibu, yang pada akhirnya memperkuat beban peran ganda yang mereka alami. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian Yurendra & Rasyidah (2019), Hasibuan (2022), dimana Polwan memiliki lebih banyak opsi dalam mengatur beban domestik, seperti memanfaatkan jasa pembantu rumah tangga.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang selaras dengan kajian tentang peran ganda Polisi Wanita yang ditulis oleh Yurendra & Rasyidah (2019), Sartin dkk., (2019). Polisi Wanita di lokasi penelitian lainnya juga mempunyai dua peran yang dilakukan sekaligus, baik dalam rumah tangga maupun di kantor kepolisian. Hal ini bisa memicu

terjadinya konflik peran ganda yang akan berpengaruh pada penyeimbangan peran ganda polisi wanita dan keluarganya, seperti hasil penelitian oleh Rahmayati (2020), wanita dituntut untuk menjalankan pekerjaan secara profesional dengan segala tanggungjawabnya. Namun bagi wanita karier yang telah menikah tuntutan urusan rumah tangga, pasangan, anak dan juga urusan rumah tangga lainnya menjadi tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan. Dengan dua tanggung jawab tersebut wanita karier harus mampu menyeimbangkan antara urusan rumah tangga maupun urusan pekerjaan sehingga dapat meminimalisir konflik peran ganda. Ada pun hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawan (2020) menunjukan bahwa perempuan yang sudah menikah akan tetapi harus ikut bekerja di luar rumah atau sektor domestik maka akan memiliki peran ganda didalam kehidupannya yaitu bekerja di ruang domestik dan publik. Hal ini dilakukan untuk membantu suami mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan perekonomian didalam keluarga.

Sementara itu, meskipun Polwan menduduki posisi penting atau memiliki tanggung jawab besar di lingkungan kerja, peran sebagai perempuan yang diasosiasi dengan kelelahan dan kesabaran tetap dianggap lebih sesuai untuk tugas-tugas tertentu yang terkait dengan perempuan dan anak-anak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Polisi Wanita (Polwan) yang bertugas di Kepolisian Resor (Polres) Sumba Timur mampu menjalankan peran domestik dan peran publik secara ganda secara simultan, yakni sebagai aparatur negara di ruang publik dan sebagai ibu serta istri di ranah domestik. Meskipun demikian, peran ganda ini tidak lepas dari tantangan yang kompleks, seperti kesulitan dalam membagi waktu antara tugas kedinasan dan tanggung jawab rumah tangga, tekanan psikologis akibat beban kerja yang berat, serta keterbatasan dukungan dari institusi maupun lingkungan sekitar. Namun, Polwan di Polres Sumba Timur mampu menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut melalui strategi manajemen waktu yang baik, komunikasi yang efektif dengan keluarga, dan pemanfaatan dukungan sosial dari rekan kerja maupun atasan. Keberhasilan Polwan dalam menjalankan dua peran tersebut tidak hanya menunjukkan kompetensi profesional mereka, tetapi juga mencerminkan ketangguhan perempuan dalam menghadapi peran ganda tanpa mengesampingkan salah satunya. Dengan demikian, keberadaan Polwan yang menjalankan peran ganda ini membuktikan bahwa perempuan mampu berperan aktif di ruang publik tanpa meninggalkan tanggung jawabnya di ruang privat, sekaligus menjadi inspirasi dan representasi positif bagi masyarakat.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan. Pertama, bagi institusi kepolisian, perlu adanya kebijakan internal yang lebih responsif terhadap kebutuhan Polwan yang memiliki peran domestik, seperti penyesuaian jam kerja, ketersediaan fasilitas pendukung seperti ruang laktasi dan penitipan anak, serta layanan konseling psikologis yang dapat membantu mengelola stres akibat peran ganda. Hal ini penting agar Polwan dapat bekerja secara optimal tanpa mengorbankan keseimbangan kehidupan pribadinya. Kedua, dukungan dari keluarga, khususnya pasangan dan orang tua, sangat dibutuhkan agar Polwan merasa dihargai dan tidak terbebani secara emosional. Keterlibatan keluarga dalam memahami dinamika pekerjaan Polwan akan membantu memperkuat fondasi domestik mereka. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian serta menggali lebih dalam pengaruh faktor-faktor budaya lokal terhadap pelaksanaan peran ganda Polwan, mengingat nilai-nilai budaya dapat sangat mempengaruhi persepsi dan ekspektasi terhadap peran gender. Terakhir, masyarakat secara umum diharapkan dapat meningkatkan apresiasi terhadap kontribusi perempuan dalam sektor publik agar tidak lagi terjebak dalam stereotip gender yang membatasi ruang gerak perempuan. Kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan harus terus didorong untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

DAFTAR REFERENSI

- Darmawan, O. A., & Handoyo, P. (2020). Peran ganda buruh perempuan pada keluarga dan pekerjaan (Studi kasus di pabrik PT. Sampoerna Tbk). *Paradigma*, 9(1).
- Hasibuan, E. S. (2022). Polisi wanita (Polwan): Reformasi kesetaraan gender dalam tubuh Polri. *Krtha Bhayangkara*, 16(1).
- Hura, T. B. K. L., & Nugrohowardhani, R. L. K. R. (2024). Identifikasi peran gender perempuan pemecah batu di Kelurahan Temu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. *Pepatudzu: Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*, 20(1), 53–67.
- Kartikasari, D., & Suryani, L. (2021). Peran ganda dan stres kerja pada perempuan bekerja di sektor publik dan domestik. *Jurnal Psikologi Terapan*, 9(2), 110–122. <https://doi.org/10.21009/jpt.v9i2.45>
- Khairunnisa, R., & Hidayati, R. (2021). Analisis peran ganda perempuan dalam menjalankan tanggung jawab domestik dan pekerjaan formal. *Jurnal Gender dan Sosial*, 3(1), 88–96.
- Nursyamsiah, I., & Harahap, R. (2020). Pengaruh peran ganda terhadap produktivitas kerja pada Polwan di Polrestabes Medan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(1), 20–30.

- Oktaviani, R., & Supriyanto, D. (2021). Peran ganda wanita karier dalam keluarga dan pekerjaan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(1), 101–112.
- Rahmayati, T. E. (2020). Konflik peran ganda pada wanita karier: Konflik peran ganda pada wanita karier. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganeshha Medan)*, 3(1), 152–165.
- Sartin, A., Bauto, H. L. O. M., & Supiyah, R. (2019). Peran ganda perempuan yang berprofesi sebagai polisi wanita di Kabupaten Wakatobi. *Jurnal Neo Societal*, 4(3).
- Saviera, B., & Juniarly, A. (2020). Keterlibatan kerja dan konflik peran ganda pada polisi wanita. *Psychology Journal of Mental Health*, 2(1), 61–72.
- Sulastri, S., & Almurhan. (2019). Konflik peran ganda terhadap tingkat stres kerja polisi wanita di Polres Lampung Utara. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik*, 15(1), 19–25.
- Susanti, N., & Aminah, S. (2022). Strategi coping polisi wanita dalam menghadapi tekanan peran ganda. *Jurnal Psikologi dan Sosiologi*, 4(2), 134–146.
- Wulandari, T., & Prasetyo, E. (2023). Faktor penyebab stres kerja akibat peran ganda pada polwan. *Jurnal Humaniora dan Ilmu Sosial*, 8(1), 55–63.
- Yurendra, M. P., & Rasyidah. (2019). Peran ganda polisi wanita terhadap tuntutan karir dan keluarga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 4(2).
- Yusri, N. A., & Farida, M. (2018). Gambaran stres kerja pada polisi wanita di Kepolisian Resor Kota Padang. *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam*, 9(1), 72–78.